



SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 000.9.3.4 – 3580 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENGELOLA PENGADUAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional secara cepat, tepat, tertib, tuntas, dan dapat dipertanggungjawabkan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, perlu dibentuk Tim Pengelola Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
- b. bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 490.05.1741 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Pengelola Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Melalui Aplikasi Layanan Pengaduan Online Rakyat di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri sudah tidak relevan dengan kebutuhan dan dinamika pengelolaan sistem pengaduan pelayanan publik sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Tim Pengelola Pengaduan Kementerian Dalam Negeri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
3. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 499);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 333);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG TIM PENGELOLA PENGADUAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI.
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Pengaduan yang selanjutnya disebut Tim dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri dari:
1. Pembina;
 2. Pengarah;
 3. Penanggung jawab;
 4. Pejabat Pengelola Pengaduan;
 5. Pejabat Penghubung;
 6. Pejabat Pelaksana; dan
 7. Petugas Pelayanan Pengaduan.
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah :
1. Pembina memiliki tugas untuk:
 - a. memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengelolaan pengaduan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
 - b. menetapkan keanggotaan tim pengelola pengaduan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri; dan
 - c. melakukan evaluasi secara berkala atas kinerja tim.
 2. Pengarah memiliki tugas untuk:
 - a. memberikan arah kegiatan dan pelaksanaan pengelolaan pengaduan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri; dan
 - b. membangun komitmen para pejabat pimpinan tinggi madya untuk mendukung percepatan tindak lanjut penyelesaian pengaduan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
 3. Penanggung jawab memiliki tugas untuk:
 - a. memimpin seluruh tahapan pengelolaan pengaduan di lingkungan Unit Kerja Eselon I; dan
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan pengaduan di lingkungan Unit Kerja Eselon I.

4. Pejabat Pengelola Pengaduan memiliki tugas untuk:
 - a. berkoordinasi dengan Pejabat Penghubung terkait Pengelolaan Pengaduan secara langsung atau tidak langsung di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
 - b. menjalankan fungsi sebagai admin instansi yang mengelola Pengaduan Pelayanan Publik melalui SP4N;
 - c. menunjuk petugas pelayanan Pengaduan untuk membantu dalam proses penerimaan, pencatatan, verifikasi, dan distribusi Pengaduan;
 - d. mendistribusikan Pengaduan kepada Pejabat Penghubung yang berwenang;
 - e. memberikan tanggapan awal Pengaduan berdasarkan *Frequently Asked Question*;
 - f. melakukan pemantauan kinerja Pengelolaan Pengaduan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
 - g. melakukan evaluasi secara berkala mengenai kemajuan pelaksanaan pelayanan Pengaduan lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
 - h. menyusun laporan kinerja Pengelolaan Pengaduan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri; dan
 - i. melakukan sosialisasi terkait Pengelolaan Pengaduan kepada masyarakat.
5. Pejabat Penghubung memiliki tugas untuk:
 - a. berkoordinasi dengan Pejabat Pelaksana untuk tindak lanjut penyelesaian Pengaduan sesuai dengan kewenangannya;
 - b. menunjuk petugas pelayanan Pengaduan untuk membantu dalam proses penerimaan, pencatatan, verifikasi, dan distribusi Pengaduan;
 - c. meneruskan Pengaduan kepada Pejabat Pelaksana sesuai dengan kewenangannya;
 - d. memantau tindak lanjut penyelesaian Pengaduan;
 - e. menyusun *frequently asked question* substansi Pengaduan dari seluruh UKE II;
 - f. menindaklanjuti Pengaduan berdasarkan *frequently asked question*;
 - g. memberikan informasi kepada Pejabat Pengelola Pengaduan mengenai status penyelesaian Pengaduan dan langkah yang dilakukan untuk mempercepat penyelesaian; dan
 - h. melakukan monitoring dan evaluasi atas pelayanan Pengaduan yang dilakukan oleh Pejabat Pelaksana.
6. Pejabat Pelaksana memiliki tugas untuk:
 - a. menindaklanjuti Pengaduan dengan cermat, cepat, dan tuntas;
 - b. memberikan respon dan tanggapan sesuai dengan substansi Pengaduan;
 - c. memberikan tanggapan ulang apabila diperlukan hingga penanganan Pengaduan selesai; dan
 - d. memberikan informasi kepada Pejabat Penghubung mengenai status penyelesaian Pengaduan dan langkah yang dilakukan untuk menyelesaikan Pengaduan.
7. Petugas Pelayanan Pengaduan memiliki tugas untuk membantu dalam proses penerimaan, pencatatan, verifikasi dan distribusi Pengaduan.

- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku maka Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 490.05.1741 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Pengelola Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Melalui Aplikasi Layanan Pengaduan Online Rakyat di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 September 2025

MENTERI DALAM NEGERI,

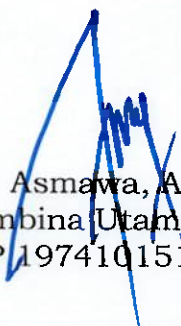
ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
3. Direktur Jenderal Otonomi Daerah;
4. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan;
5. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah;
6. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum;
7. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
8. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa;
9. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah;
10. Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri;
11. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
12. Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
13. Kepala Biro dan Pusat di Lingkungan Sekretariat Jenderal; dan
14. Yang Bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum



Dr. Asmawa, AP., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP.197410151993111003

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 000.9.3.4 – 3580 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENGELOLA PENGADUAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA PENGADUAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

NO	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Menteri Dalam Negeri	Pembina
2.	Sekretaris Jenderal	Pengarah
3.	Kepala Pusat Penerangan	Pejabat Pengelola Pengaduan
4.	Inspektur Jenderal	Penanggung jawab
5.	Sekretaris Inspektur Jenderal	Pejabat Penghubung
6.	Inspektur I	Pejabat Pelaksana
7.	Inspektur II	Pejabat Pelaksana
8.	Inspektur III	Pejabat Pelaksana
9.	Inspektur IV	Pejabat Pelaksana
10.	Inspektur Khusus	Pejabat Pelaksana
11.	Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum	Penanggung jawab
12.	Sekretaris Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum	Pejabat Penghubung
13.	Direktur Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan	Pejabat Pelaksana
14.	Direktur Politik Dalam Negeri	Pejabat Pelaksana
15.	Direktur Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Pejabat Pelaksana
16.	Direktur Organisasi Kemasyarakatan	Pejabat Pelaksana
17.	Direktur Kewaspadaan Nasional	Pejabat Pelaksana
18.	Direktur Jenderal Otonomi Daerah	Penanggungjawab
19.	Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah	Pejabat Penghubung
20.	Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan DPOD	Pejabat Pelaksana
21.	Direktur Fasilitas Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat	Pejabat Pelaksana
22.	Direktur Fasilitas Kelembagaan dan Kepegawaian Daerah	Pejabat Pelaksana

23.	Direktur Produk Hukum Daerah	Pejabat Pelaksana
24.	Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah	Pejabat Pelaksana
25.	Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan	Penanggung jawab
26.	Sekretaris Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan	Pejabat Penghubung
27.	Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan Kerja Sama	Pejabat Pelaksana
28.	Direktur Kawasan, Perkotaan, dan Batas Negara	Pejabat Pelaksana
29.	Direktur Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat	Pejabat Pelaksana
30.	Direktur Toponimi dan Batas Daerah	Pejabat Pelaksana
31.	Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran	Pejabat Pelaksana
32.	Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah	Penanggung jawab
33.	Sekretaris Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah	Pejabat Penghubung
34.	Direktur Perencanaan Anggaran Daerah	Pejabat Pelaksana
35.	Direktur Pelaksanaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah	Pejabat Pelaksana
36.	Direktur Pendapatan Daerah	Pejabat Pelaksana
37.	Direktur Fasilitasi Transfer dan Pembiayaan Utang Daerah	Pejabat Pelaksana
38.	Direktur BUMD, BLUD, dan Barang Milik Daerah	Pejabat Pelaksana
39.	Direktur Jenderal Bina Pemerintahan dan Desa	Penanggung jawab
40.	Sekretaris Direktur Jenderal Bina Pemerintahan dan Desa	Pejabat Penghubung
41.	Direktur Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa	Pejabat Pelaksana
42.	Direktur Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa	Pejabat Pelaksana
43.	Direktur Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa	Pejabat Pelaksana
44.	Direktur Kelembagaan dan Fasilitasi Kerjasama Desa	Pejabat Pelaksana
45.	Direktur Evaluasi Perkembangan Desa	Pejabat Pelaksana
46.	Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penanggung jawab
47.	Sekretaris Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pejabat Penghubung
48.	Direktur Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Pejabat Pelaksana
49.	Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pejabat Pelaksana
50.	Direktur Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pejabat Pelaksana

51.	Direktur Integrasi Data Kependudukan Nasional	Pejabat Pelaksana
52.	Direktur Integrasi Data Kependudukan Daerah	Pejabat Pelaksana
53.	Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah	Penanggung jawab
54.	Sekretaris Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah	Pejabat Penghubung
55.	Direktur Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah	Pejabat Pelaksana
56.	Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I	Pejabat Pelaksana
57.	Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II	Pejabat Pelaksana
58.	Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III	Pejabat Pelaksana
59.	Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV	Pejabat Pelaksana
60.	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Penanggung jawab
61.	Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pejabat Penghubung
62.	Kepala Pusat Standarisasi dan Sertifikasi	Pejabat Pelaksana
63.	Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Pejabat Pelaksana
64.	Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen Kepemimpinan	Pejabat Pelaksana
65.	Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Teknis	Pejabat Pelaksana
66.	Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri	Penanggung jawab
67.	Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri	Pejabat Penghubung
68.	Kepala Pusat Strategi Kebijakan Politik, Hukum dan Pemerintahan Dalam Negeri	Pejabat Pelaksana
69.	Kepala Pusat Strategi Kewilayahan, Kependudukan dan Pelayanan Publik	Pejabat Pelaksana
70.	Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pembangunan, Keuangan Daerah dan Desa	Pejabat Pelaksana
71.	Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pengembangan SDM, Teknologi Informasi dan Inovasi Pemerintahan Dalam Negeri	Pejabat Pelaksana
72.	Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri	Penanggung jawab
73.	Wakil Rektor Bidang Hukum, Keja sama dan Kepegawaian Institut Pemerintahan Dalam Negeri	Pejabat Penghubung
74.	Kepala Biro Administrasi Akademik dan Perencanaan	Pejabat Pelaksana
75.	Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan	Pejabat Pelaksana
76.	Kepala Biro Administrasi Keprajaan, Kemahasiswaan dan Alumni	Pejabat Pelaksana
77.	Kepala Biro Administrasi Hukum, Kepegawaian dan Hubungan Masyarakat	Pejabat Pelaksana

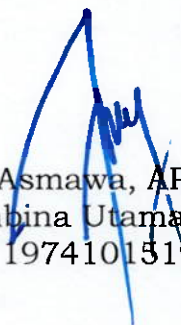
78.	Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana	Pejabat Penghubung
79.	Kepala Biro Administrasi Pimpinan	Pejabat Pelaksana
80.	Kepala Biro Keuangan dan Aset	Pejabat Pelaksana
81.	Kepala Biro Perencanaan	Pejabat Pelaksana
82.	Kepala Biro Hukum	Pejabat Pelaksana
83.	Kepala Pusat Fasilitas Kerjasama	Pejabat Pelaksana
84.	Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi	Pejabat Pelaksana
85.	Kepala Biro Kepegawaian	Pejabat Pelaksana
86.	Kepala Biro Umum	Pejabat Pelaksana

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum


Dr. Asmawa, AP.,M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 197410131993111003

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 000.9.3.4 – 3580 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENGELOLA PENGADUAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

PETUGAS PELAYANAN PENGADUAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

NO	UNIT KERJA	JABATAN	NAMA	AKUN	TELEPON
1.	Pusat Penerangan Sekretariat Jenderal	Analisis hasil pengawasan dan pengaduan masyarakat	Rasyid Alkindy	pengaduan@kemendagri.go.id	0895380014229
2.	Pusat Penerangan Sekretariat Jenderal	Analisis Pengaduan Pemerintahan	Muhammad Ardian Rachmawan	pengaduan@kemendagri.go.id	081320731702
3.	Pusat Penerangan Sekretariat Jenderal	Analisis hasil pengawasan dan pengaduan masyarakat	Arkorn Munandar	puspen@lapor.go.id	082220002138
4.	Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal	Pengelola Data	Azizah Nur Fiqa Pangestuti	biroperencanaan@lapor.go.id	085790692324
5.	Pusat Fasilitas Kerjasama Sekretariat Jenderal	Penata Kelola Pemerintahan	Lalu Rizky Rasyid Fahreza	fasker.kemendagri@lapor.go.id	081395185714
6.	Biro Hukum Sekretariat Jenderal	Analisis Berkas Sengketa	Novia Widiyaningsih	rohumsetjen@lapor.go.id	085256419396
7.	Pusat Data dan Sistem Informasi Sekretariat Jenderal	Kepala Subbagian Persuratan	Widya Rachmi Mustika Sari	pusdatin@ppid.kemendagri.go.id	0818895835
8.	Biro Organisasi dan Tata laksana Sekretariat Jenderal	Pranata Komputer Ahli Pertama	Ilham Rahadi Anshary	setjen@lapor.go.id ortalasetjen@lapor.go.id	081311200312
9.	Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum	Pengelola Program dan Laporan pada Subbagian Sistem, Prosedur, dan Kinerja	Muhammad Sultan Salahuddin Alzazuli	ditjenpolpum@lapor.go.id	083899668989
10.	Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri	Pustakawan ahli muda	Aji Nur Cahyo	bskdn@lapor.go.id	081219419885

11.	Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri	Pustakawan ahli pertama	Shinta Silviana	bskdn@lapor.go.id	081219419885
12.	Sekretariat Ditjen Bina Keuangan Daerah	Analisis Hukum Ahli Muda	Muniah	keuda@lapor.go.id	081382051973
13.	Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah	Analisis Perencanaan Anggaran	Sabhikisma Dwi Wahyu Utomo	anggarankeuda@lapor.go.id	081392389787
14.	Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Fadel Muhammad Wicaksono	p2kdkeuda@lapor.go.id	081250585323
15.	Direktorat Pendapatan Daerah	Perencana Ahli Pertama	Endah Putri Utami	pendapatankeuda@lapor.go.id	0878733111877
16.	Direktorat Fasilitas Transfer dan Pembiayaan Utang Daerah	Perencana Ahli Pertama	Utri Madekawati	tu.daper@gmail.com	081295397638
17.	Direktorat BUMD, BLUD, dan Barang Milik Daerah	Pengelola Keuangan	Raihan Idheandra Putri	tub3.binakeuda@gmail.com	085216488912
18.	Sekretariat Badan Pengembangan SDM	Penelaah Teknis Kebijakan	Muthmainna A. Djaguna	bpsdm@lapor.go.id	082110810165
19.	Sekretariat Ditjen Otonomi Daerah	Pranata Komputer Ahli Pertama	Serli Yulianti	otda.bagren@gmail.com	081291819797
20.	Sekretariat Ditjen Otonomi Daerah	PPNPN	Trislyna Lisisca	otda.bagren@gmail.com	089611965199
21.	Direktorat Fasilitas Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah	PPNPN	Johan Octavianus Siregar	fkcpdotda@lapor.go.id	089606796997
22.	Direktorat Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah	Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat EKPKD	Maraden Abner Panuhunan	tu.ekcpdotda@gmail.com	08983334403
23.	Direktorat Produk Hukum Daerah	Perencana Ahli Pertama	Novoda S.L Sihombing	layananpengaduan.ditphd@gmail.com	082272702747
24.	Direktorat Fasilitas Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	PPNPN	Andrianto Saputra	fkdotda@gmail.com	081290323306
25.	Direktorat Penataan	Penyusun Rencana Kebijakan	Theo Yudo Soegito	Theoyudo1912@gmail.com	081298602010

	Daerah, Otonomi Khusus dan DPOD				
26.	Sekretariat Direktorat Jenderal Administrasi Kewilayahan	Pranata Komputer Ahli Pertama	Gentha Wijaya	genthawijaya@kemendagri.go.id	082283791530
27.	Direktorat Kawasan Perkotaan dan Batas Antar Negara	Pengelola Data	Muhammad Rifky Haekal	m.rifkyhaekal@kemendagri.go.id	082128690931
28.	Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat	Kasubbag Tata Usaha	Herry Wilson Butarbutar	herry.butarbutar@kemendagri.go.id	08119126321
29.	Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Herlina Delima Angelina Lumban Gaol	herlina.delima@kemendagri.go.id	081362562412
30.	Direktorat Toponimi dan Batas Daerah	Kasubbag Tata Usaha	Ester Resimeilana	ester.resimeilana@kemendagri.go.id	08988878183
31.	Direktorat Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan Kerja Sama	Kasubbag Tata Usaha	Cahya Catur Saputra	cahya.catur@kemendagri.go.id	08122746394
32.	Bagian Hubungan Masyarakat IPDN	Penelaah Teknis Kebijakan	Dini Adhania	ipdndagri@lapor.go.id	085162738483
33.	Bagian Hubungan Masyarakat IPDN	PPNPN	Nindy Metha Mayangswari	ipdn@ppid.kemendagri.go.id	081312112159
34.	Sekretariat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Perencana Ahli Muda	Zainuddin	zainudin@kemendagri.go.id	081578826063
35.	Sekretariat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Garry Adrian Putra	garryadrianp@gmail.com	087846437055
36.	Direktorat Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Analisis Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Fitto Mufid Althaf	fittomufidalthaf@gmail.com	081220237061
37.	Direktorat Integrasi Data Kependudukan Daerah	Analisis Kebijakan Ahli Muda	AA Azhari	Pokja1_idkd@dukcapil.kemendagri.go.id	082299993593

38.	Direktorat Integrasi Data Kependudukan Nasional	Pranata Komputer Ahli Muda	Muhammad Fazal	Muhammad.fazal@dukcapil.kemendagri.go.id	081360706824
39.	Direktorat Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Yeni Astari	dafduk@lapor.go.id	081223146500
40.	Direktorat Bina Aparatur	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	Febryan Denistya Perdana	febryandenistya@gmail.com	081234869778
41.	Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah	Pengelola Surat	Farhan Maulana	binabangda@lapor.go.id	089612785233
42.	Direktorat PEIPD	Penyusun Bahan Kebijakan	Yudith Aldila Asokawati	dirpeipd@lapor.go.id	081251825191
43.	Direktorat SUPD I	Tenaga Pendukung Administrasi	Andri	dirsupd1@lapor.go.id	085695821261
44.	Direktorat SUPD II	Tenaga Pendukung Administrasi	Yulianto	dirsupd2@lapor.go.id	085810655732
45.	Direktorat SUPD III	Penyusun NSPK	Adam Udi Velianto	supdIII@lapor.go.id	081334673197
46.	Direktorat SUPD IV	Pengelola Surat	Iqbal Ramadhan	dirsupd4@lapor.go.id	082111432033
47.	Sekretariat Ditjen Bina Pemerintahan Desa	Perencana Ahli Muda	I Wayan Dharma Putra	Datamonev.binapemdes@gmail.com	081289343155
48.	Sekretariat Ditjen Bina Pemerintahan Desa	Pengolah Data	Alifah Dina Suciati	Datamonev.binapemdes@gmail.com	081287544873
49.	Direktorat Fasilitasi Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Redo Frandika	papdpemdes@gmail.com	08569096880
50.	Direktorat Fasilitasi Perencanaan Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa	Kasubbag Tata Usaha	Yoenita Anggarsari	anggarseptiya@gmail.com	081227296615
51.	Direktorat Fasilitasi Kerjasama, Lembaga Pemerintahan Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Sumarwanto	Sumarwanto.pmd@gmail.com	08985037567
52.	Direktorat Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan	Arsiparis Ahli Pertama	Bayu Ardiansyah Putra	Tu.ditkdd@gmail.com	085865873807

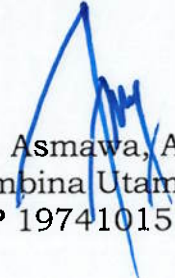
	dan Adat Desa, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dan Pos Pelayanan Terpadu				
53.	Direktorat Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa, Data, dan Evaluasi Perkembangan Desa	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Arras Shaiba	direpd@lapor.go.id	081808723861
54.	Balai Besar Pemerintahan di Malang	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	Shindiana Auliyah Pratiwi	shindianaaulitapратиwi@gmail.com	088210944307
55.	Balai Pemerintahan Desa di Yogyakarta	Analisis Keuangan	Andi Yayat Hidayat Rahmat	balaipemdesjogja@gmail.com	081239608868
56.	Balai Pemerintahan Desa di Lampung	Kepala Subbagian Tata Usaha	Kurniawan Saputra	pemdeslampung@lapor.go.id	083147737466
57.	Biro Sumber Daya Manusia	Penelaah Teknis Kebijakan	Muhammad Mainaki Riano	ropegsetjen@lapor.go.id	082183122409
58.	Biro Keuangan dan Aset	Pranata Komputer Ahli Pertama	Rezha Pitro Vcahlevi	keuanganaset@lapor.go.id	089665178068
59.	Biro Administrasi Pimpinan	Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Administrasi Pimpinan	Nella Rosita	adpim@lapor.go.id	082110057585
60.	Biro Umum	Pengolah Data dan Informasi	Adinda Nadhilah Adani Lubis	romumsetjen@lapor.go.id	087889854312

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum


Dr. Asmawa, AP., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 197410151993111003